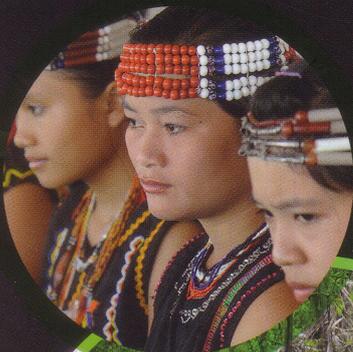




KEMENTERIAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN  
DIREKTORAT WILAYAH PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN AREAL  
PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN

# Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Konsep, Peraturan Perundangan  
dan Implementasi



Jakarta, Oktober 2011



**giz**



KEMENTERIAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN  
DIREKTORAT WILAYAH PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN AREAL  
PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN

Pembangunan  
Kesatuan Pengelolaan Hutan  
**(KPH)**

Konsep, Peraturan Perundangan  
dan Implementasi

Jakarta, Oktober 2011

**Penanggung jawab:**

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan

**Diterbitkan oleh:**

Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan

**Bekerjasama dengan:**

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH  
FORCLIME Forests and Climate Change Programme

**Disusun oleh:**

**Tim Institut Pertanian Bogor**

Hariadi Kartodihardjo  
Bramasto Nugroho  
Haryanto R Putro

**Editor:**

Ali Djajono dan Lilit Siswanty

**ISBN:** 978-602-19214-0-1

**Dicetak oleh:**

Debut Wahana Sinergi

**Didistribusi oleh:**

Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan

Jakarta, Oktober 2011

## SAMBUTAN

Menteri Kehutanan



Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan mengamatkan pengelolaan hutan dilaksanakan sampai pada tingkat unit pengelola, yaitu kesatuan pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang

dielola secara efisien dan lestari. Para akademisi, praktisi dan masyarakat di bidang kehutanan meyakini, bahwa pengelolaan hutan sampai pada tingkat tapak, atau yang disebut Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), merupakan sistem yang dapat lebih menjamin terwujudnya kelestarian fungsi dan manfaat hutan, baik dari aspek ekonomi, ekologi maupun sosial.

Meskipun secara eksplisit mandat sistem pengelolaan hutan di atas tertuang dalam peraturan yang diundangkan tahun 1999, namun konsep pengelolaan hutan sampai pada tingkat terkecil di Indonesia sudah berkembang sejak lama, dan implementasinya telah dipraktekkan di pulau Jawa. Di luar pulau Jawa, sebelum memasuki era reformasi, pengelolaan hutan juga mengadopsi konsep KPH, meskipun seluruh sistem KPH tersebut belum diadopsi secara penuh. Memasuki era reformasi dan sejalan dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang lebih luas, tatanan kelembagaan pengelolaan hutan juga mengalami perubahan. Akan tetapi, faktanya, keberadaan kelembagaan pengelolaan hutan belum dirasakan sampai ke tingkat tapak. Para rimbawan meyakini bahwa adanya unit pengelolaan hutan di tingkat tapak adalah prasyarat untuk kelestarian hutan. Oleh karena itu, pemerintah memandang perlu segera meluruskan sistem pengelolaan hutan untuk "kembali ke khittah" yang dilaksanakan oleh KPH.

Pemerintah telah menetapkan bahwa pembangunan KPH menjadi salah satu prioritas nasional yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kehutanan 2010-2014. Terwujudnya organisasi pengelolaan hutan dalam bentuk KPH akan lebih mendorong implementasi desentralisasi yang nyata, optimalisasi akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan sebagai salah satu jalan untuk resolusi konflik, kemudahan dan kepastian investasi, tertanganinya wilayah tertentu yang "belum ada" unit pengelolanya yaitu areal hutan yang belum dibebani ijin, serta upaya untuk meningkatkan keberhasilan rehabilitasi dan perlindungan hutan. Pentingnya pencapaian target prioritas pembangunan KPH, telah menjadikannya sebagai salah satu substansi di dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan.

Berdasarkan uraian di atas, Kementerian Kehutanan memandang perlu menerbitkan buku "*Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan – Konsep, Peraturan Perundangan dan Implementasi*". Buku ini akan menjadi sumber informasi penting bagi para pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun di daerah, dalam memahami, mengarahkan, menjalankan serta mengawasi proses pembangunan KPH. Pemahaman ini menjadi sangat penting utamanya bagi para pembuat kebijakan dan pengambil keputusan khususnya yang bersifat politik.

Kiranya Allah SWT senantiasa membimbing langkah bangsa Indonesia dalam upaya mewujudkan sumberdaya hutan yang lestari.

Menteri Kehutanan,

**Zulkipli Hasan**

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
PENDAHULUAN	1
Latar belakang penyusunan buku	3
Tantangan dalam pembangunan KPH	4
Tujuan dan manfaat penulisan buku	5
Metodologi penyusunan buku	5
Daftar	5
DEFINISI DAN RUANG LINGKUP	7
KPH	7
Definisi	9
KPH dan ragam fungsi hutan	10
KPH dan akses masyarakat	11
KPH dan usaha kehutanan	11
KPH dan organisasi daerah	11
KPH dan pengembangan wilayah	11
KPH dan kelestarian hutan	12
RASIONALITAS PEMBANGUNAN	15
KPH	15
Persoalan umum kehutanan Indonesia	16
Pembangunan KPH sebagai strategi	24
Tantangan pembangunan KPH	25

## KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KPH.....29

Landasan konseptual pengelolaan hutan	31
Landasan pembentukan KPH	35
Tugas pokok dan fungsi KPH	37
Pembangunan KPH	
di wilayah provinsi	47
Pembentukan organisasi KPH	49
Sumberdaya manusia	52

## PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN LINGKUP KPH.....55

Sistem perencanaan hutan	57
Tata hutan	60
Pemanfaatan hutan	64
Rehabilitasi dan reklamasi hutan	65
Perlindungan hutan	66
Pemberdayaan masyarakat	67
Rencana jangka panjang KPH	68

## PENILAIAN KINERJA KPH.....73

Konsep dasar	75
Tipologi KPH	78
Kriteria dan indikator kinerja KPH	79
Sistem penilaian kinerja KPH	82

## ASPEK SOSIAL DAN KEPERINTAHAN.....87

Tipologi masalah sosial	90
Tipologi organisasi dan pemerintahan KPH	93

## RENCANA AKSI DAN IMPLEMENTASI NASIONAL.....99

Strategi dan kebijakan	101
Program dan kegiatan	103

## PUSTAKA ACUAN.....107

## LAMPIRAN.....109



## BAB 1

# PENDAHULUAN

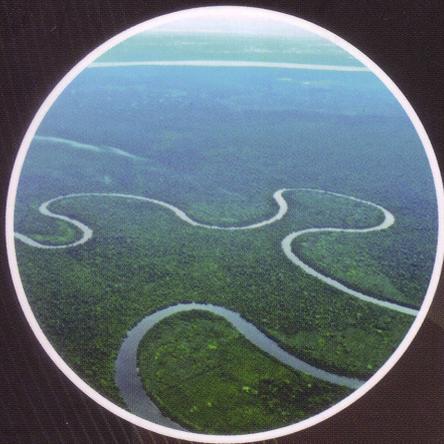
- Latar belakang penyusunan buku
- Tantangan dalam pembangunan KPH
- Tujuan dan manfaat penulisan buku
  - Metodologi penyusunan buku
  - Isi buku

## PUSTAKA ACUAN

- Departemen Kehutanan (DepHut), 2010. Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2010-2029. Departemen Kehutanan. Jakarta.
- DKN (Dewan Kehutanan Nasional), 2008. Meniti Langkah Membangun Pilar Kehutanan: Prioritas Revisi Regulasi Pengelolaan Hutan Alam dan Hutan Tanaman. Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2009. Prioritas Pembangunan Kehutanan: Menyelamatkan Kekayaan Multi-fungsi Hutan dan Mewujudkan Keadilan Alokasi Pemanfaatan Hutan. Jakarta
- Hawitt, Sally. 2009. *Discourse Analysis and Public Policy Research*. Centre for Rural Economy, Discussion Paper Series No. 24, 2009. New Castle University
- Kementerian Kehutanan, 2010. RKTN (Rencana Kehutanan Tingkat Nasional). Draft 20 Agustus 2010. Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2009a. Kebijakan Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat. Direktorat Bina Pengembangan Hutan Tanaman. Departemen Kehutanan. Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2009b. Kebijakan Pembangunan Hutan Tanaman Industri. Direktorat Bina Pengembangan Hutan Tanaman. Departemen Kehutanan. Jakarta.
- Ribot, J. C. and N. Peluso, 2003. A Theory of Access. *Rural Sociology* 68 (2): 153-181.
- Shore, Cris dan Susan Wright. 1997. Policy: A new field of anthropology. Di dalam: *Anthropology of Policy: Critical Perspective on Governance and Power*, (Cris Shore dan Susan Wright, eds). Routledge. London and New York.
- Tim Terpadu, 2009. Perencanaan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah. Jakarta.

# Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Konsep, Peraturan Perundangan  
dan Implementasi



KEMENTERIAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN  
**DIREKTORAT WILAYAH PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN AREAL  
PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN**

Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lt. 5  
Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270  
Telp. (021) 5730288, 5730298; Email: ditwil.kph@gmail.com

ISBN 978-602-19214-0-1



9 786021 921401